



Kebijakan-Kebijakan Pemprov Kalimantan Timur dalam mendorong penerapan RIL-C untuk mendukung Carbon Fund PCPF

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Bogor , 8 Mei 2018

Dukungan sektor kehutanan untuk Kaltim Hijau

Penguatan KPH

FCPF Carbon Fund

Perhutanan Sosial



Carbon Fund FCPF

- Pada COP 21, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi 29% dengan upaya sendiri dan 41% dari BAU dengan dukungan internasional
- Kaltim terpilih sebagai wilayah Carbon Fund dengan luas 12,747,924 ha, dimana 6,508,998 ha (54%) masih berhutan.
- Sebagian besar hutan alam tersebut berada di wilayah KPH dan wilayah konservasi. Pada tahun 2016, sekitar 2.9 juta ha hutan Kaltim berada di wilayah konsesi IUPHHK-HA.

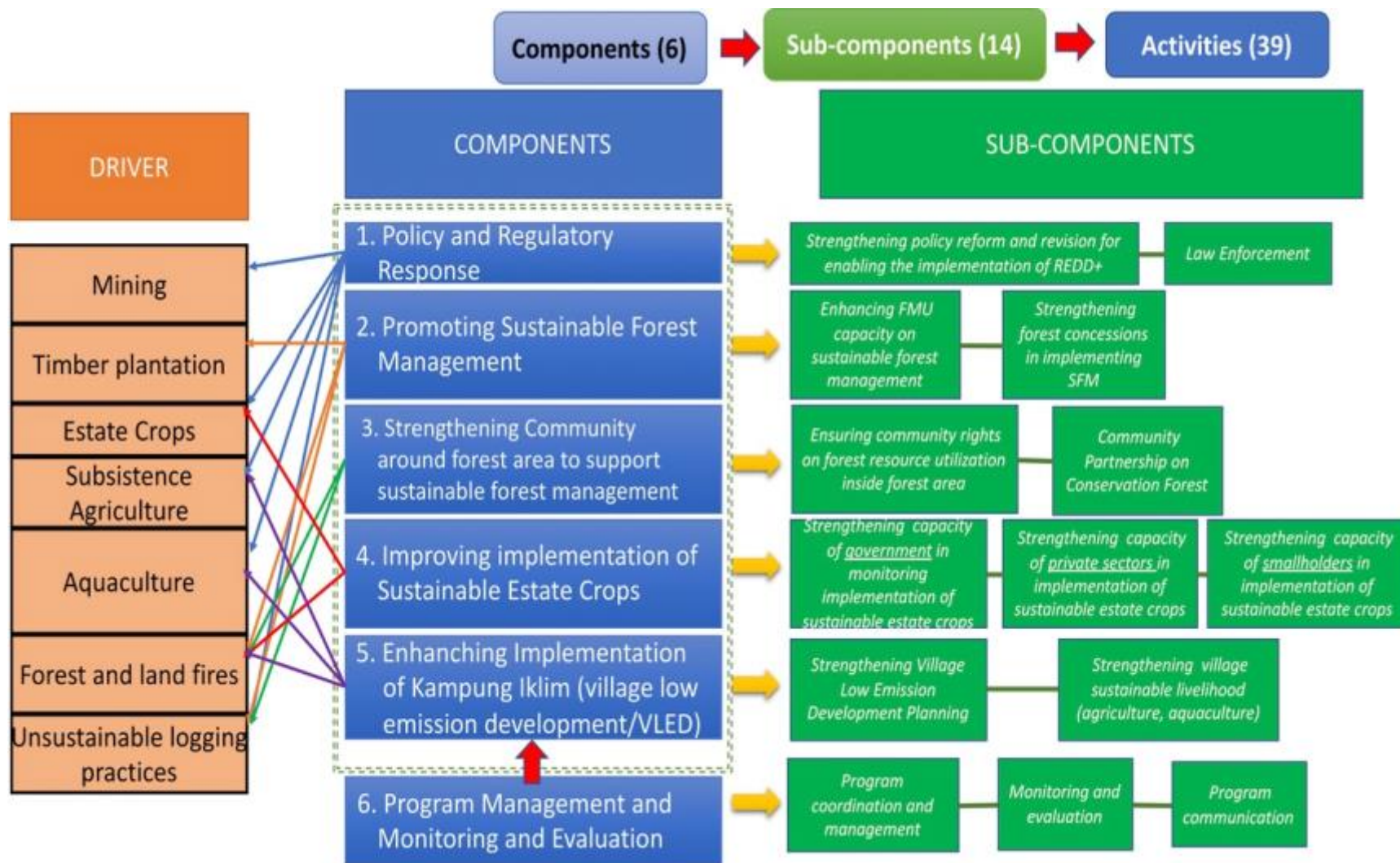
Pengelolaan hutan alam dan pemanfaatan kayu di Kalimantan Timur

- Lebih dari 20 IUPHHK-HA mendapatkan sertifikasi PHPL (baik mandatory maupun voluntary)
- Hutan alam Kalimantan Timur mensuplai **Kayu untuk industri pengolahan kayu dalam negeri**, terutama untuk produksi plywood dan kayu gergajian.

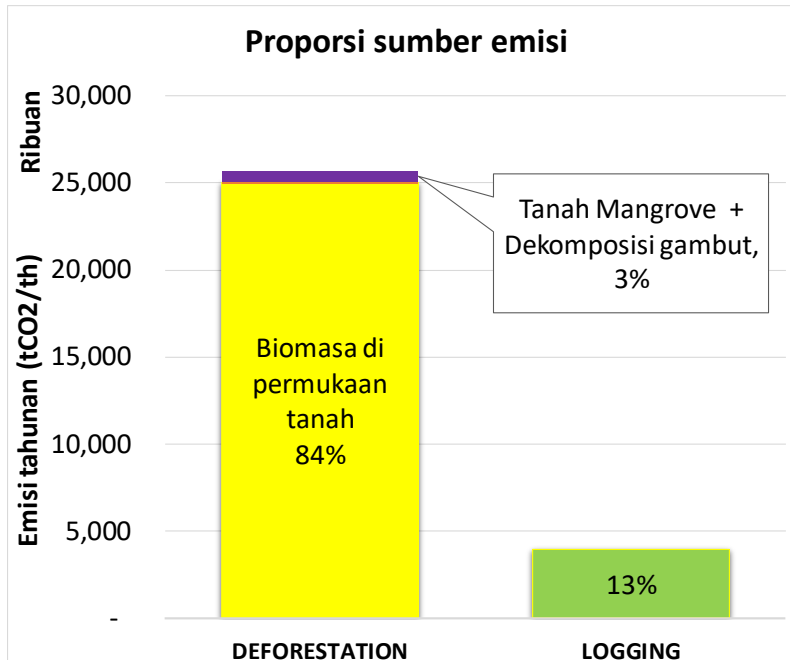
KPH di Kalimantan Timur



Rancangan program penurunan emisi di Kalimantan Timur



Peran penting RIL-C dalam program penurunan emisi



Baseline emisi:

- Kegiatan pembalakan oleh IUPHHK-HA di Kalimantan Timur menyumbang 13 % emisi

Target penurunan emisi:

- Secara keseluruhan, target penurunan emisi di Kaltim adalah sebesar 29% dari baseline emisi.
- RIL-C mampu mengurangi 40% dari baseline emisi kegiatan pembalakan. Sehingga RIL-C akan berkontribusi lebih dari 13% dari total target penurunan emisi.

Target Penerapan RIL-C di Kalimantan Timur

2019 : 11 IUPHHK-HA

2020 – 2024: Secara bertahap seluruh IUPHHK-HA menerapkan RIL-C

Intervensi untuk penerapan RIL-C

1. Memastikan aktor kunci berkomitmen untuk mengadopsi dan menerapkan praktek pengelolaan lestari
2. Memperkuat reformasi dan revisi kebijakan agar kondusif untuk penerapan REDD+,
3. Penyebarluasan kebijakan SFM and RIL kepada stakeholder yang relevan
4. Penguatan kapasitas KPH
5. Penguatan IUPHHK-HA dalam penerapan SFM

Kebijakan – kebijakan untuk mendorong penerapan RIL-C di Kalimantan Timur

- Peraturan Daerah tentang perubahan iklim: Perda yg menaungi berbagai kegiatan terkait perubahan Iklim (Sedang proses di DPRD)
- Peraturan Gubernur tentang penerapan RIL-C oleh pemegang IUPHHK-HA
- SK kepala Dinas Kehutanan tentang audit dan penghitungan penurunan emisi dari RIL-C oleh KPH

Dukungan dari KLHK

1. Penunjukkan Kaltim sebagai propinsi model revitalisasi bisnis kehutanan & replikasi RIL-C
2. Dukungan Peraturan untuk mendukung implementasi RIL C : Juknis implementasi dan insentif
3. Dukungan pendanaan untuk implementasi (APBN, Mitra, Swasta)
4. Dukungan pengembangan teknis RIL C